

## Peristiwa Malari 1974: Pergeseran Narasi dari Gerakan Moral ke Stigma Politik dalam Propaganda Orde Baru

Ganda Febri Kurniawan,<sup>1</sup> Alfira Apriyanti<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [ganda@mail.unnes.ac.id](mailto:ganda@mail.unnes.ac.id), [alfiraapriyanti97@students.unnes.ac.id](mailto:alfiraapriyanti97@students.unnes.ac.id)

\*Korespondensi



Received: 16-10-2025, Revised: 13-07-2026, Accepted: 15-07-2026, Published: 30-07-2026

### Abstrak

Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 merupakan salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia yang menandai ketegangan antara mahasiswa, kelompok masyarakat, dengan pemerintah Orde Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu terjadinya Malari, dinamika aksi mahasiswa, serta respons pemerintah dalam konteks stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah historis, dengan pendekatan analisis dokumen, arsip surat kabar, serta literatur sekunder terkait kebijakan ekonomi dan politik pada masa itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malari bukan sekadar protes terhadap investasi asing, tetapi juga mencerminkan kritik terhadap korupsi, ketidakadilan sosial, dan kontrol politik Orde Baru. Lebih jauh, peristiwa ini mengungkap pola interaksi antara gerakan moral mahasiswa dan stigma politik yang dikonstruksi oleh pemerintah melalui propaganda. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami Malari sebagai fenomena sosial-politik yang kompleks, sekaligus menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah tekanan rezim otoriter.

**Kata Kunci:** Mahasiswa; Malari; Orde Baru; Propaganda; Protes politik

### Abstract

The Malari incident on January 15, 1974, was a pivotal moment in Indonesian political history, marking tensions between students, community groups, and the New Order government. This study aims to analyze the factors that triggered Malari, the dynamics of student action, and the government's response within the context of political stability and economic development. The research method used is historical, with an analytical approach to documents, newspaper archives, and secondary literature related to economic and political policies at the time. The results show that Malari was not simply a protest against foreign investment but also reflected a critique of corruption, social injustice, and the political control of the New Order. Furthermore, this event reveals patterns of interaction between student moral movements and the political stigma that the government constructs through propaganda. This study provides a new perspective in understanding Malari as a complex socio-political phenomenon, while also emphasizing the role of students as agents of change amidst the pressures of an authoritarian regime.

**Keywords:** Malari; New Order; Political Protest; Propaganda; Students



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Tuntutan terhadap demokratisasi di negara-negara dengan sistem otoritarian birokratik (OB) pada dasarnya tidak hanya lahir dari dinamika internal masyarakatnya, tetapi juga dipengaruhi oleh arus perubahan global. Memasuki pertengahan tahun 1980-an, banyak negara dengan rezim otoriter di berbagai belahan dunia mulai menghadapi krisis yang serius. Krisis tersebut muncul karena kelemahan struktural yang sudah melekat lama, seperti sentralisasi kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi dan kolusi yang meluas, serta tidak adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Akibatnya, muncul tekanan besar dari warga sipil yang menuntut kebebasan berpendapat, keterbukaan politik, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Fenomena tekanan masyarakat terhadap rezim otoriter ini, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, dikenal sebagai *gelombang demokrasi ketiga* (*the third wave of democratization*), yaitu sebuah periode global di mana banyak negara mulai bergerak meninggalkan sistem politik yang represif menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif (Huntington, 1991).

Gelombang demokratisasi tersebut tidak hanya berhenti di kawasan Eropa atau Amerika Latin, tetapi juga menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Pengaruh arus global ini perlahan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kebebasan sipil dan hak politik. Meskipun rezim Orde Baru di bawah Soeharto masih berusaha mempertahankan stabilitas politik dengan pendekatan otoriter, tanda-tanda perubahan mulai tampak sejak awal tahun 1990-an. Pada masa ini, kelompok masyarakat sipil seperti pelajar, kaum intelektual, organisasi non-pemerintah, dan sebagian media mulai mengorganisir diri secara lebih terbuka. Mereka menuntut adanya transparansi, keadilan sosial, dan perubahan sistem politik yang lebih demokratis. Gerakan masyarakat sipil ini awalnya tumbuh perlahan karena masih dibayangi oleh tekanan politik dan kekuasaan dari pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, jaringan dan solidaritas antar kelompok pro-demokrasi semakin kuat. Tekanan yang terus-menerus dari bawah inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penting yang menggoyang kekuasaan Orde Baru (Rajab, 2004).

Perkembangan perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru memang menunjukkan pergerakan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1965, saat negara ini hampir tidak memiliki sektor industri modern. Melalui kebijakan yang membuka pintu bagi modal asing dan utang luar negeri, serta didukung oleh *oil boom* pada awal tahun 1970-an, pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan industri secara pesat. Dalam waktu sekitar dua dekade, hasil produksi industri meningkat hingga sepuluh kali lipat, terutama pada sektor-sektor seperti tekstil dan kebutuhan pokok lainnya. Infrastruktur juga berkembang pesat jalan raya, transportasi, hingga sektor penerbangan menunjukkan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi ini menciptakan stabilitas ekonomi makro yang relatif terkendali, dengan inflasi yang berhasil terjaga di bawah 10 persen. Namun perubahan besar ini juga membawa dampak struktural terhadap komposisi ekonomi Nasional. Sektor pertanian, yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian, mulai tersisih karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun drastis. Sebaliknya, sektor industri meningkat tajam hingga akhirnya menyalip pertanian sebagai penyumbang nilai tambah

ekonomi utama pada awal tahun 1990-an. Meski demikian, industri yang tumbuh pesat tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga kemajuan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Dari sudut pandang mahasiswa, pencapaian ini tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang merata. Pertumbuhan industri yang tinggi justru memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin, antara sektor kota dan desa (Hill, 1996).

Kemajuan ekonomi Indonesia di bawah Orde Baru merupakan hasil nyata dari strategi pembangunan yang berbasis pada investasi asing dan industrialisasi besar-besaran. Namun, di balik angka yang tampak mengesankan itu, terdapat ketimpangan mendasar: pertumbuhan yang tidak inklusif, struktur ekonomi yang timpang, dan kesejahteraan yang belum sepenuhnya merata. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa modal asing memang mampu mempercepat proses modernisasi, namun tanpa pemerataan kebijakan, pembangunan hanya menguntungkan segelintir kalangan yang berada dekat dengan kekuasaan.

Jika dilihat dari konteks sosial dan ekonomi masa Orde Baru, munculnya gerakan mahasiswa kritis sebenarnya adalah konsekuensi dari pola pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah terlalu memuja pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial di dalamnya. Negara memang berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan industri yang pesat melalui investasi asing, namun dibalik itu terjadi ketimpangan antara kelas atas dan rakyat kecil. Mahasiswa melihat Pembangunan yang dijalankan Orde Baru hanya melahirkan kemajuan semu, di mana angka perekonomian meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat belum benar-benar terwujud. Kenyataannya adalah ketika suara mahasiswa yang sejatinya muncul dari kepedulian terhadap nasib rakyat justru dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Pemerintah Orde Baru tidak mau mengakui bahwa kritik adalah bagian penting dari demokrasi, mereka justru memutarbalikkan gerakan moral menjadi isu politik, seolah-olah mahasiswa adalah lawan negara.

Beberapa studi telah dilakukan mengenai insiden Malari, seperti yang dilakukan oleh Jazimah (2013), Padiatra (2015), Fathonah et al. (2023), dan Suwirta (2018). Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada kronologi peristiwa, faktor penyebab, dampak gerakan mahasiswa, dan representasi media, studi ini berfokus pada pergeseran narasi gerakan mahasiswa dari gerakan moral menjadi stigma politik yang dibangun oleh propaganda Orde Baru. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana Malari terjadi tetapi juga menganalisis bagaimana rezim Soeharto membangun wacana politik untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa melalui propaganda dan kontrol informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Insiden Malari 1974, dinamika gerakan mahasiswa, respons pemerintah Orde Baru, dan proses konstruksi propaganda yang mengubah gerakan moral mahasiswa menjadi stigma politik. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang Malari sebagai fenomena sosial-politik dan peran mahasiswa sebagai kekuatan kritis melawan pemerintahan Orde Baru. Penelitian ini penting karena studi tentang Insiden Malari sebagian besar berfokus pada kerusuhan, demonstrasi mahasiswa, dan penolakan modal asing. Pada saat yang sama, proses pembentukan narasi politik oleh pemerintah Orde Baru relatif kurang mendapat perhatian. Namun, propaganda yang dikendalikan negara memainkan peran

penting dalam membentuk persepsi publik terhadap gerakan mahasiswa dan berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk memperkaya historiografi Malari dan memberikan pemahaman tentang bagaimana rezim otoriter menggunakan kontrol informasi dan konstruksi wacana untuk membungkam kritik sosial. Di luar nilai akademisnya, penelitian ini juga signifikan sebagai refleksi tentang kehidupan demokrasi kontemporer mengenai pentingnya kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga keadilan sosial dan kehidupan politik demokratis.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 2015) dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. Data penelitian diambil dari kajian kepustakaan, data koran/majalah, di mana seluruh data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan melalui kontekstual dan eksploratif, dengan menggunakan teknik *in-depth analysis* untuk menggali makna, simbol, dan pengalaman manusia secara holistik secara alami, fleksibel, dan deskriptif analisis yang dimulai dari tema khusus menuju pemahaman yang lebih luas. Analisis data terutama dilakukan untuk melihat secara lebih luas bagaimana kebijakan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada modal asing tidak hanya membentuk struktur ekonomi nasional, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial dan kesadaran politik masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini juga tidak sekadar memandang mahasiswa sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang bereaksi terhadap ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh sistem ekonomi dan politik Orde Baru.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Malari 1974**

Pada masa transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto, Indonesia memasuki babak baru yang dikenal sebagai awal berdirinya Orde Baru. Pergantian ini bermula dari dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, yang memberikan wewenang penuh kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan keselamatan pasca peristiwa G30S/PKI. Dengan amanat tersebut, Soeharto segera melarang PKI beserta organisasi yang berafiliasi dengannya dan mulai menertibkan kehidupan politik Nasional. Meski secara *de facto* telah memegang kekuasaan sejak tahun 1965, Soeharto tetap berhati-hati karena di tubuh militer dan masyarakat sipil masih terdapat pendukung kuat Soekarno. Ia memilih memperkuat posisinya secara perlahan dengan strategi yang sistematis hingga akhirnya, melalui Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto resmi diangkat menjadi pejabat presiden, dan setahun kemudian dikukuhkan menjadi presiden penuh Republik Indonesia.

Sebagai presiden baru, Soeharto menghadapi tantangan besar berupa instabilitas politik dan ekonomi yang diwariskan dari masa Demokrasi Terpimpin. Untuk mengatasinya, ia berupaya membentuk format politik baru yang berorientasi pada stabilitas dan pembangunan Nasional. Di satu sisi, sistem ini harus mampu

mengakomodasi berbagai kekuatan pendukung Orde Baru, dan di sisi lain, harus menghindari kekacauan politik seperti masa sebelumnya. Pada tahap awal pemerintahannya, Soeharto berusaha menampilkan iklim politik yang tampak lebih terbuka, di mana pers dan organisasi sosial diberi ruang untuk menyebarkan aspirasi. Dalam politik luar negeri, pemerintah mengubah arah kebijakan dengan mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia, kembali menjalin hubungan dengan negara-negara Barat, dan membawa Indonesia kembali bergabung dengan PBB.

Namun, di balik tampilan keterbukaan tersebut, Soeharto secara perlahan membangun kekuasaan yang kuat dengan menempatkan militer dan kalangan teknokrat sebagai pilar utama pemerintahannya. Untuk memperkuat basis politiknya, ia membentuk Golongan Karya (Golkar) yang berperan sebagai kendaraan politik utama rezim Orde Baru. Keberhasilan Golkar dalam pemilu 1971 yang memenangkan mayoritas kursi di DPR menjadi bukti kuatnya kekuasaan politik Soeharto dan militernya. Setelah berhasil menguasai lembaga eksekutif, pemerintah melangkah lebih jauh dengan sistem kepartaian. Pada tahun 1973, melalui keputusan MPR, sembilan partai politik dilebur menjadi dua partai besar: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mewadahi partai-partai Islam, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menampung partai-partai nasionalis dan Kristen. Kebijakan ini berhasil menciptakan sistem politik yang stabil di permukaan, tetapi sekaligus mengonsolidasikan kekuasaan Soeharto secara absolut. Pemerintahan yang semula tampak longgar dan terbuka kembali berubah menjadi sistem politik yang ketat dan terkendali (Padiatra, 2015).

Pada awal pemerintahannya, Soeharto menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah dengan inflasi mencapai 650% per tahun. Melalui kebijakan yang tegas dan terarah, ia berhasil menurunkan inflasi menjadi di bawah 15% hanya dalam dua tahun dengan menertibkan anggaran, memperbaiki sistem perbankan, mengembalikan mekanisme ekonomi pasar, serta menjalin kerja sama dengan negara-negara Barat untuk menarik modal dan investasi. Langkah ini kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang menjadi dasar pembaruan kebijakan ekonomi nasional, serta penerapan program *Pembangunan Lima Tahun* (Pelita) yang dirancang bersama para ahli untuk mencapai pembangunan jangka Panjang (Rahmawati, 2022).

Pemerintah juga membentuk Tim Ekonomi yang diberi mandat khusus untuk mencari dukungan serta bantuan dari luar negeri. Tim ini memiliki tugas utama menyampaikan komunikasi dengan pihak asing guna merundingkan kembali utang luar negeri Indonesia yang telah jatuh tempo. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengupayakan bantuan keuangan baru dari negara dan lembaga internasional, serta menarik minat investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia sebagai langkah awal pemulihan ekonomi Nasional. Selanjutnya, Presiden Soeharto membentuk Asisten Pribadi (ASPRI) dan melaksanakan Operasi Khusus (Opsus) sebagai bagian dari upaya memperkuat dan mengonsolidasikan kekuasaan rezim Orde Baru. Opsus ini dirancang untuk menjalankan berbagai langkah strategis, termasuk menyusup ke partai-partai politik dan menerapkan kebijakan *divide et impera* atau perpecahan politik guna menyertakan lawan politik serta memastikan seluruh agenda pemerintah berjalan tanpa hambatan berarti. Operasi ini dijalankan secara tertutup dan penuh kerahasiaan hingga dekade 1980-an, saat

posisi Soeharto dan kekuasaan Orde Baru sudah benar-benar mapan dan sulit digoyahkan (Listari, 2012).

Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada stabilisasi dan pertumbuhan di bawah Soeharto pada awal Orde Baru memang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis, namun keberhasilan itu menyimpan konsekuensi serius. Ketergantungan terhadap modal asing dan dukungan negara-negara Barat membentuk struktur ekonomi yang tidak seimbang, di mana keuntungan pembangunan lebih banyak dinikmati oleh segelintir elite politik dan pengusaha besar yang dekat dengan kekuasaan. Industrialisasi yang dibangun bersifat semu karena bergantung pada investasi luar negeri, sementara sektor rakyat seperti pertanian dan industri kecil justru terabaikan. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar antara pusat dan daerah, serta antara kelas atas dan masyarakat bawah.

Kondisi inilah yang kemudian memicu munculnya gelombang ketidakpuasan sosial, terutama di kalangan pelajar yang mulai menyadari bahwa arah pembangunan Orde Baru telah menyimpang dari semangat awalnya. Janji pemerataan kesejahteraan berubah menjadi dominasi ekonomi yang dikendalikan oleh segelintir kelompok penguasa dan pemodal asing.

Situasi Indonesia pada awal tahun 1970-an menampilkan dinamika sosial dan politik yang kompleks di tengah upaya pemerintah Orde Baru membangun stabilitas Nasional. Setelah berhasil menekan inflasi dan menata perekonomian melalui bantuan luar negeri serta kebijakan ekonomi yang liberal, pemerintahan Soeharto memang sempat menuai pujian karena dianggap mampu membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi pasca-Orde Lama. Namun, keberhasilan itu tidak sepenuhnya berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat tinggi justru menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam, karena hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh segelintir elit politik, pejabat militer, dan pengusaha besar yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Industrialisasi yang dijalankan bersifat semu karena bergantung pada modal asing, sementara sektor pertanian dan industri kecil yang menjadi tumpuan hidup mayoritas rakyat diabaikan. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, serta antara kelas atas dan bawah, semakin melebar.

Dalam konteks sosial, keresahan mulai muncul dari kalangan pelajar pada saat itu menjadi kelompok intelektual dengan kesadaran politik yang tinggi. Jumlah siswa yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran pendidikan yang memadai, fasilitas perpustakaan yang terbatas, dan biaya hidup yang kian tinggi akibat inflasi. Kondisi ini diperparah oleh merebaknya korupsi di kalangan pejabat tinggi negara yang justru muncul di tengah pertumbuhan ekonomi. Korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap idealisme Orde Baru yang awalnya menjanjikan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat. Pada tahun 1970, situasi tersebut menimbulkan gelombang ketidakpuasan yang meluas di kalangan mahasiswa. Media kampus seperti *Mahasiswa Indonesia* bahkan menulis tahun itu sebagai “tahun ketidakpuasan,” menggambarkan kekecewaan mahasiswa terhadap arah kebijakan negara yang dianggap tidak adil.

Beberapa tokoh mahasiswa seperti Arief Budiman, Sjahrir, Julius Usman, dan Victor D. kemudian memprakarsai gerakan *Mahasiswa Menggugat* sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak dan praktik korupsi yang merajalela. Gerakan ini menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada pemberantasan korupsi

dibandingkan sekedar memperluas pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dari Jakarta hingga Bandung, aksi-aksi protes semakin meluas dengan dukungan organisasi pelajar seperti KAPPI dan kelompok *Bandung Bergerak*. Mereka membentuk *Komite Anti Korupsi (KAK)* yang dipimpin oleh Arief Budiman, Sjahrir, dan Marsilam Simandjuntak untuk menekan pemerintah melakukan reformasi nyata (Mintapraja, 2021; Huda, 2023). Mahasiswa turun ke jalan, menempelkan poster-poster antikorupsi di kantor Pertamina dan Kejaksaan Agung, serta melakukan audiensi dengan pejabat tinggi, termasuk DPR-GR dan Presiden Soeharto sendiri. Namun, alih-alih merespons dengan sikap terbuka, pemerintah justru menunjukkan ketakutan terhadap gerakan moral siswa yang semakin kritis. Pembentukan *Komisi Empat Anti Korupsi* oleh pemerintah pada bulan Februari 1970, yang diketuai oleh Wilopo dan melibatkan mantan Wakil Presiden Hatta, hanya menjadi alat peredam sementara. Komisi ini tidak kunjung memberikan hasil yang konkret, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Gerakan mahasiswa pun kembali memanas karena merasa bahwa rezim hanya melakukan tindakan simbolik untuk meredakan tekanan rakyat. Dalam situasi seperti ini, ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa kian tajam, terutama setelah aparat keamanan mulai memberikan ancaman terbuka terhadap aksi-aksi protes. Panglima Kopkamtib, Jenderal Soemitro, bahkan secara terang-terangan mengancam akan menurunkan tentara jika mahasiswa tetap melakukan aksi malam tirakatan pada 15 Agustus 1970 (Rosyidah, 2025).

Memasuki tahun 1972, gelombang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru semakin nyata. Setelah sebelumnya mahasiswa banyak menyoroti praktik korupsi dan ketimpangan ekonomi, kini muncul babak baru protes yang berawal dari kebijakan simbolik namun sarat kontroversi gagasan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diusulkan oleh Ibu Tien Soeharto. Keinginan proyek ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih rapuh, sebab pemerintah sendiri baru saja menghapuskan penghematan dan pengetatan anggaran demi menopang program pembangunan jangka panjang. Ketika Ibu Negara secara terbuka meminta “sumbangan sukarela” dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan untuk membiayai proyek tersebut, banyak kalangan terutama pelajar menilai langkah itu sebagai bentuk otoritas kekuasaan dan pemborosan dana publik di tengah penderitaan rakyat kecil (Rajab, 2004).

Kritik terhadap Proyek TMII segera meluas menjadi aksi-aksi protes di berbagai kampus besar, khususnya di Jakarta dan Bandung. Mahasiswa membentuk berbagai gerakan spontan seperti *Gerakan Penyelamat Uang Rakyat* dan *Gerakan Akal Sehat (GAS)* yang menyuarakan persetujuan terhadap proyek tersebut karena dianggap tidak mencerminkan prioritas pembangunan Nasional. Pemerintah Orde Baru menanggapi dengan keras: sejumlah aktivis seperti Arief Budiman dan HJ Princen ditangkap, beberapa surat kabar seperti *Sinar Harapan*, *Indonesia Raya*, dan *Harian Kami* sempat diberedel, sementara wartawan yang bersuara kritis mengalami tekanan langsung dari aparat keamanan. Meski begitu, tekanan yang dilakukan pemerintah justru memperkuat perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Akhirnya, kasus pembangunan TMII dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas secara resmi. Setelah melalui pembentukan Komisi Penyelidik, DPR memutuskan bahwa proyek TMII boleh dilanjutkan, namun dengan beberapa ketentuan penting: proyek tersebut tidak boleh menggunakan dana dari

anggaran negara, dan tidak boleh ada sumbangan wajib dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Keputusan ini dimaksudkan sebagai kompromi politik untuk meredakan ketegangan antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah (Padiatra, 2015).

Penolakan terhadap Proyek TMII tidak hanya dilandasi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rasa ketidakadilan sosial yang semakin terasa nyata. Ketimpang antara kelompok elite dan rakyat kecil semakin mencolok simbolnya terlihat dari gaya hidup mewah para pejabat tinggi, seperti Ibnu Sutowo, Direktur Pertamina, yang dikenal sebagai representasi “raja minyak” pada masa itu. Di saat rakyat harus berhemat karena harga-harga kebutuhan pokok terus melonjak, pemerintah malah menggelar acara-acara besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jakarta yang menelan biaya hingga Rp 2 miliar, serta berbagai penyambutan mewah bagi pejabat dan organisasi istri pejabat seperti Dharma Wanita. Kondisi ini menimbulkan ironi mendalam di tengah kehidupan rakyat kecil yang kian sulit, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan baru yang justru melemahkan ruang ekonomi mereka, seperti larangan berdagang bagi pedagang kaki lima di pusat-pusat kota.

Menjelang tahun 1973, situasi sosial dan politik Indonesia berada dalam kondisi yang semakin tegang (Khairani, 2016). Meskipun pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto masih menampilkan citra stabilitas dan kemajuan ekonomi di permukaan, kenyataan di lapangan jauh dari gambaran ideal tersebut. Pembangunan yang digembar-gemborkan ternyata tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin nyata, kesenjangan antara pribumi dan non-pribumi semakin melebar. Dalam suasana penuh ketidakpuasan itu, sebuah peristiwa besar terjadi di Bandung pada tanggal 5 Agustus 1973. Insiden yang berawal dari pemukulan seorang pribumi oleh warga Tionghoa dengan cepat berubah menjadi menghasilkan besar yang berbau rasial. Massa menyerang toko, rumah, dan pabrik milik warga keturunan Tionghoa, membakar kendaraan, serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam akibat kebijakan ekonomi yang timpang, di mana kelompok tertentu memperoleh keuntungan besar dari pembangunan, sementara sebagian besar rakyat tetap terpinggirkan (Legowo, 2013).

Kerusuhan di Bandung menjadi tanda bahwa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru telah mencapai titik berbahaya. Media saat itu memicu peristiwa ini dengan jurang ekonomi yang kian lebar dan sikap pemerintah yang tampak tidak peduli terhadap persoalan keadilan sosial. Di tengah kondisi tersebut, pelajar yang sejak awal dikenal sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa kembali muncul ke permukaan dengan semangat perlawanan yang lebih terarah. Di kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, berbagai diskusi dan forum intelektual diadakan untuk menyoroti arah pembangunan yang dianggap menyimpang. Salah satu momen penting terjadi di Universitas Indonesia pada tanggal 13–16 Agustus 1973, dalam sebuah diskusi bertema “28 Tahun Kemerdekaan Indonesia.” Dalam forum itu, para tokoh nasional seperti Soebadio Sastrosatomo, Sjafruddin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan TB Simatupang menegaskan bahwa bangsa ini tidak bisa terus-menerus terjebak dalam wacana dan retorika; sudah saatnya dilakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi rakyat. Semangat dari diskusi itu kemudian diwujudkan

dalam bentuk gerakan moral yang lebih konkret. Pada tanggal 24 Oktober 1973, Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI) yang dipimpin oleh Hariman Siregar mengeluarkan *Petisi 24 Oktober*, sebuah pernyataan terbuka yang ditujukan kepada pemerintah, militer, teknokrat, dan kaum politikus agar meninjau kembali strategi pembangunan nasional yang dinilai tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat. Petisi tersebut dibacakan dalam sebuah upacara simbolik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, disertai pembacaan puisi-puisi protes dan lagu perjuangan, menandai babak baru keterlibatan mahasiswa dalam politik nasional. Dalam petisi itu, mahasiswa menegaskan peran mereka sebagai *kekuatan moral* kekuatan moral yang menuntut arah pembangunan nasional kembali pada cita-cita kesejahteraan rakyat. Mereka juga menolak teori *Trickle Down Effect* yang dijadikan dasar kebijakan ekonomi Orde Baru, karena faktanya kemakmuran tidak pernah “menetes ke bawah,” melainkan hanya beredar di kalangan elit penguasa dan pengusaha besar.

Petisi ini menggugah kesadaran baru di kalangan pemuda dan pelajar di berbagai daerah. Kampus-kampus di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan ikut mengeluarkan pernyataan serupa, menandakan munculnya solidaritas nasional di kalangan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap gagal menegakkan keadilan sosial. Di waktu yang hampir bersamaan, berbagai aksi protes bermunculan mulai dari penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Perkawinan oleh organisasi mahasiswa Islam hingga kritik terhadap kampanye “anti-rambut gondrong” yang dianggap tidak substansial di tengah kesulitan hidup rakyat. Aksi-aksi mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa ruang ekspresi kritik terhadap pemerintah semakin menyempit, sementara keresahan sosial di akar rumput semakin meluas. Situasi itu semakin diperparah oleh dua peristiwa besar yang menambah semangat gerakan siswa. Pertama, pada bulan Oktober 1973 terjadi penggulingan Marsekal Thanom Kittikachorn di Thailand oleh kekuatan pelajar. Keberhasilan mahasiswa Thailand menumbangkan rezim menjadi inspirasi militer langsung bagi mahasiswa Indonesia, yang merasa memiliki misi moral serupa untuk melawan kesewenang-wenangan dan ketimpangan. Kedua, pada akhir tahun 1973, kunjungan JP Pronk Ketua IGGI Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda ke Indonesia menimbulkan gelombang protes besar. Mahasiswa melihat kunjungan itu sebagai simbol ketergantungan Indonesia terhadap modal asing dan bentuk baru kolonialisme ekonomi. Demonstrasi besar yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa seperti Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Indonesia (GMII) menampilkan poster-poster dengan tulisan satir seperti “*Dengan Modal Asing, Modal Pribumi Hilang*” dan “*Minyak Bumiku Disedot Orang*” (Suwirta, 2018).

Rangkaian peristiwa sepanjang tahun 1973 ini semakin menampilkan tajamnya pertentangan antara pemerintah yang berupaya menjaga stabilitas politik dengan generasi muda yang menuntut keadilan dan kemandirian bangsa. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap modal asing, korupsi, serta tindakan represif aparat menjadi pembakar semangat mahasiswa untuk melawan pemerintah.

### **Meletusnya Peristiwa Malari 1974**

Menjelang akhir tahun 1973, suasana politik Indonesia semakin memanas, terutama di kalangan pelajar dan intelektual muda yang menilai arah pembangunan

Orde Baru semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi yang tajam, dominasi modal asing, serta perilaku elitis dari lingkaran kekuasaan menjadi pemicu utama munculnya gelombang ketidakpuasan di berbagai daerah. Di Yogyakarta, sekitar lima puluh mahasiswa yang menamakan diri mereka Gerakan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (GEMIRI) menggelar aksi simbolik dengan memasang spanduk-spanduk protes menyambut kedatangan Ketua IGGI sekaligus Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda, JP Pronk. Dalam pernyataan sikapnya, GEMIRI menolak segala bentuk bantuan luar negeri yang dinilai hanya memperdalam tirai pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Mereka menilai bahwa kebijakan pembangunan Orde Baru bergantung pada modal asing bukanlah bentuk kemandirian ekonomi, melainkan bentuk baru dari penjajahan ekonomi yang menguntungkan pihak luar dan kaum elite dalam negeri (Farchan, 2022).

Sikap kritis mahasiswa senada Yogyakarta dengan gelombang protes di berbagai kota besar lainnya. Di Jakarta dan Bandung, intensifikasi terus berlangsung, menyoroti kebijakan ekonomi “pilih kasih” pemerintah yang lebih berpihak kepada kalangan pengusaha besar, terutama non-pribumi dan investor asing. Isu utama yang menjadi sasaran kemarahan mahasiswa adalah peran para Asisten Pribadi (ASPRI) Presiden khususnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani yang dianggap memonopoli akses terhadap proyek-proyek besar dan menjalin hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Jepang (Listari, 2012). Kedua tokoh ini dinilai menjadi simbol kekuasaan di balik layar yang menjerumuskan Indonesia ke dalam ketergantungan utang luar negeri serta dominasi ekonomi Jepang dalam berbagai sektor strategis. Tidak hanya pelajar, kalangan intelektual dan ekonom juga mulai berani memikirkan arah pembangunan Orde Baru. Salah satunya adalah Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dosen ekonomi Universitas Indonesia yang memahami strategi dasar ekonomi yang dijalankan oleh teknokrat Orde Baru seperti Widjojo Nitisastro. Kritik juga datang dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Jenderal AH Nasution, yang menyampaikan kembali kekhawatiran Bung Hatta tentang masa depan ekonomi nasional yang semakin terjerat oleh kepentingan modal asing. Kekhawatiran ini mencerminkan keresahan intelektual terhadap masa depan bangsa yang mulai kehilangan kemandiriannya dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Memasuki penghujung tahun, ketegangan politik di ibu kota semakin meningkat. Di Jakarta, Bogor, dan Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus mengorganisir gerakan bersama untuk menuntut perubahan arah kebijakan. Sekitar seratus wakil Dewan Mahasiswa berusaha menemui Presiden Soeharto di Istana Negara guna menyampaikan aspirasi mereka, namun upaya tersebut gagal karena Soeharto tidak berada di tempatnya. Mereka kemudian mencoba menemui Sekretaris Negara, Sudharmono, tetapi juga tidak berhasil. Akhirnya, rombongan pelajar itu pindah ke kediaman pribadi Presiden di Jalan Cendana, namun tetap tidak dapat bertemu. Kegagalan ini menambah kekecewaan mahasiswa, dan semakin mempertegas jarak antara penguasa dengan rakyat, khususnya kaum muda yang selama ini menjadi tumpuan harapan reformasi moral bangsa. Sementara itu, pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan tidak tinggal diam.

Setelah malam tirakatan yang menjadi simbol kebangkitan kesadaran politik mahasiswa itu, ketegangan antara pemerintah dan kalangan kampus semakin meningkat. Para ASPRI (Asisten Pribadi Presiden), yang selama ini menjadi aktor

penting di balik kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru, mulai melancarkan serangan balik dengan menggunakan propaganda dan isu-isu yang dimaksudkan untuk memecah belah solidaritas mahasiswa (Listari, 2012). Mereka menuduh gerakan mahasiswa telah “ditunggangi” oleh kekuatan politik tertentu dan menyebarkan selebaran yang mendiskreditkan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DMUI), Hariman Siregar, dengan tuduhan bahwa ia telah berkhianat terhadap semangat reformasi 1965. Namun, upaya provokasi ini gagal setelah DMUI mengadakan sidang internal yang menjamin dukungan kembali terhadap kepemimpinan Hariman serta menegaskan bahwa gerakan mahasiswa bersifat independen dan murni memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai atau kelompok politik manapun (Fathonah et al., 2023).

Situasi semakin memanas menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, pada 14–17 Januari 1974. Bagi mahasiswa, kunjungan ini bukan sekedar pertemuan persahabatan, tetapi simbol dari semakin kuatnya cakupan modal asing, khususnya Jepang, terhadap ekonomi nasional. Maka, sejak 9 Januari 1974, mahasiswa mulai menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai kota, terutama di Jakarta dan Bandung. Mereka menuntut agar pemerintah menghentikan ketergantungan terhadap Jepang dan menindak para pejabat serta Aspri seperti Soedjono Hoemardani yang dianggap sebagai perantara kepentingan ekonomi Jepang di Indonesia. Dalam berbagai aksi itu, mahasiswa membakar boneka-boneka yang menggambarkan Tanaka dan para Aspri sebagai bentuk simbolik dari perlawanan terhadap dominasi asing dan asumsi kekuasaan.

Pada tanggal 11 Januari 1974, delegasi dari Dewan-Dewan Mahasiswa diterima oleh Presiden Soeharto di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, mereka secara langsung mengkritik lemahnya wibawa pemerintah akibat perilaku para pejabat dan Aspri yang memperkaya diri sendiri melalui kolusi dengan pihak asing. Mereka menilai bahwa lembaga seperti Opsus (Operasi Khusus) yang dipimpin Ali Moertopo telah memiliki kekuasaan yang melampaui kewenangan pemerintah dan parlemen. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan apa pun. Soeharto menolak memberikan tanggapan tegas, dan hal ini semakin mengecewakan serta kemarahan mahasiswa terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat. Kegagalan dialog tersebut kemudian menjadi titik balik perlawanan mahasiswa. Pada tanggal 12 Januari 1974, Dewan Mahasiswa menggelar Apel Siaga Mahasiswa di kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka menjelang kedatangan Perdana Menteri Tanaka. Dalam apel itu, mahasiswa memperkuat agar masyarakat ikut menerima simbol-simbol penjajahan ekonomi baru, dengan memasang bendera setengah tiang, memboikot pemberitaan tentang tunjangan Tanaka, dan melakukan aksi total pada 15 Januari 1974. Seruan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa di Bandung, Bogor, dan Yogyakarta, yang kemudian menyatakan solidaritasnya terhadap gerakan di Jakarta (Satriya, 2016).

Dari titik inilah, api perlawanan mahasiswa terhadap rezim Orde Baru mencapai puncaknya, yang kemudian meledak dalam peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974 sebuah tragedi politik yang menandai benturan terbuka antara idealisme mahasiswa dan kekuasaan otoriter negara (Jazimah, 2013; Nurlaeni, 2022). Peristiwa ini tidak hanya menjadi simbol dari akumulasi kekecewaan terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi modal asing, tetapi juga

menandai pergeseran hubungan antara mahasiswa dan pemerintah dari mitra moral menjadi oposisi politik yang dianggap berbahaya oleh rezim Soeharto.

Pada tanggal 15 Januari 1974, suasana politik di Jakarta mencapai titik panasnya. Sejak pagi hari, ratusan mahasiswa berkumpul di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Salemba untuk menyusun kembali tuntutan perjuangan yang dikenal dengan nama Tritura Baru. Isi tuntutan itu mencerminkan keresahan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah Orde Baru, yaitu: (1) Bubarkan Aspri, (2) Turunkan harga, dan (3) Ganyang asumsi (Suharsih & Kusuma, 2007). Poin ketiga ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya menolak ketergantungan ekonomi pada modal asing, tetapi juga menentang praktik korupsi dan merendahkan kekuasaan oleh para pejabat dekat Presiden, terutama kelompok Asisten Pribadi (Aspri) seperti Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani, yang dianggap sebagai simbol ketimpangan dan korupsi politik. Menanggapi desakan tersebut, Ali Moertopo menyatakan bahwa pembubaran Aspri adalah hak prerogatif presiden, seolah menegaskan bahwa mahasiswa tidak memiliki ruang untuk mempengaruhi keputusan politik tingkat tinggi pernyataan yang justru semakin memperkuat kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap pemerintah (Listari, 2012).

Setelah menyusun tuntutan, massa mahasiswa bergerak ke Monumen Nasional (Monas) di menuju Lapangan Merdeka. Dalam perjalanan menuju pusat kota, jumlah massa bertambah signifikan karena para pelajar ikut bergabung dalam barisan aksi. Semangat solidaritas generasi muda ini mengubah arus pembekuan menjadi gelombang besar yang menggema di sepanjang jalan protokol Jakarta. Sepanjang perjalanan, massa menurunkan bendera-bendera penyambutan tamu negara menjadi setengah tiang sebagai bentuk simbolik dari “duka cita bangsa” atas kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, yang mereka anggap sebagai wakil dari kekuatan ekonomi asing yang telah memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin di Indonesia. Aksi itu menandakan bahwa perlawanan mahasiswa telah bergerak dari sekadar kritik intelektual menuju gerakan moral dan simbolis yang menantang legitimasi kekuasaan negara (Agustina, 2014).

Sementara itu, pada 14 Januari 1974 malam, Tanaka dan putri Makiko tiba di Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 19.45 WIB. Tidak seperti biasanya, kedatangan tamu negara tidak disambut dengan upacara militer kenegaraan, yang menunjukkan bahwa pemerintah pun menyadari situasi yang sedang tegang. Tanaka kemudian langsung menuju Wisma Negara bersama Presiden Soeharto menggunakan mobil kenegaraan *Mercedes 600 “Indonesia I.”* Di sisi lain, massa demonstran yang gagal masuk ke area Halim tetap berusaha menembus barikade aparat, namun bentrokan berhasil dicegah pada malam itu. Aksi mahasiswa memang belum mencapai puncak pada hari tersebut mereka menahan diri dan mulai menyusun rencana untuk menggelar aksi yang lebih besar dan tajam keesokan harinya, yang kemudian dikenal sebagai puncak dari Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974 (Lailah & Syah, 2013).

Peristiwa Malari 1974 menjadi titik ledak dari akumulasi kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap semakin jauh dari cita-cita keadilan sosial. Setelah apel besar di kampus Universitas Indonesia dibubarkan, mahasiswa sebenarnya telah kembali ke rumah masing-masing dengan damai. Namun, situasi kemudian berubah drastis ketika unsur-

unsur di luar gerakan siswa yang terdiri dari preman, perusuh, dan massa tak terkendali mulai bergerak secara liar di jalanan Jakarta. Aksi damai siswa berubah menjadi besar, ditandai dengan pembakaran mobil-mobil buatan Jepang, perusakan toko-toko, gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Tindakan anarkis ini menjadi bukti bahwa gerakan moral pelajar telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oportunis yang tidak memiliki agenda ideologis, melainkan sekadar mencari keuntungan di tengah kekacauan.

Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, yang mengetahui situasi tersebut, segera berusaha mengendalikan massa dan menghentikan paksaan. Ia mengirimkan agar aksi tetap dalam koridor moral dan tidak merugikan pada kekerasan, namun kondisi di lapangan sudah tidak terkendali. Kerusuhan terus berlangsung hingga keesokan harinya, meski berbagai organisasi kemahasiswaan dan tokoh masyarakat telah tiba agar massa menahan diri. Menyadari bahwa situasi semakin memburuk, Hariman akhirnya menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang pada malam tanggal 16 Januari 1974, dan tampil di televisi nasional untuk menyampaikan pernyataan resmi Dewan Mahasiswa UI yang menentang segala bentuk kekerasan dan tindakan destruktif yang terjadi selama berlangsung (Situmeang, 2012).

Dampaknya sangat besar. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, ratusan bangunan dan kendaraan hancur. Data dari *Mahasiswa Indonesia* mencatat sedikitnya 9 orang tewas, 23 luka-luka, dan kawasan Pusat Perdagangan Senen luluh lantak dengan ratusan mobil terutama buatan Jepang dibakar. Sementara itu, Jenderal M. Panggabean melaporkan kerugian lebih besar, yakni 807 mobil dan 187 motor rusak, 144 gedung terbakar, serta 160 kilogram emas hilang. Data lain dari Marzuki Arifin menunjukkan bahwa 11 orang meninggal, 137 luka-luka, dan hampir seribu kendaraan rusak, termasuk gedung Coca-Cola dan Pertamina. Kerusuhan ini menjadi puncak dari ketegangan politik dan sosial yang sudah lama membara akibat ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap modal asing, dan rasa tidak adil di tengah masyarakat.

Sebagai respons terhadap peristiwa ini, pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan besar-besaran. Sekitar 700 orang ditangkap, dengan 45 di antaranya tetap ditahan, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Hariman Siregar, Soebadio Sastrosatomo, Sarbini Sumawinata, Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Rahman Tolleng, dan HJ Princen. Pemerintah menuduh bahwa kelompok-kelompok ini memiliki keterlibatan langsung dalam memicu kebocoran, meskipun banyak dari mereka sebenarnya hanya bersuara kritis terhadap kebijakan negara. Selain penangkapan, Orde Baru juga membungkam kebebasan pers dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Pemerintah menilai media massa ikut memperkeruh keadaan melalui pemberitaan yang dianggap provokatif dan tidak bertanggung jawab. Hasilnya, sekitar 12 media besar dibredel, di antaranya *Indonesia Raya*, *Pedoman*, *Kami*, *Mahasiswa Indonesia*, *Nusantara*, *Abadi*, dan *The Jakarta Times*. Tindakan ini menandai awal dari masa kelam bagi kebebasan pers Indonesia, di mana kritik terhadap pemerintah mulai dikontrol ketat dan jurnalisme independen perlahan dibungkam atas nama stabilitas politik (Hadi & Kusuma, 2012).

## Gerakan Moral ke Stigma Politik dalam Propaganda Orde Baru

Rezim Soeharto secara sistematis membangun konstruksi sosial-politik yang menyelewengkan makna perjuangan mahasiswa. Pada awalnya, gerakan mahasiswa pada era Orde Baru tumbuh dari kesadaran moral dan intelektual, bukan dari ambisi politik kekuasaan. Mereka berupaya menjadi *moral force* kekuatan penyeimbang terhadap negara dengan menyoroti ketimpangan sosial, praktik korupsi yang merajalela, serta ketergantungan ekonomi terhadap modal asing. Namun, ketika suara-suara kritis itu semakin menguat dan mulai menyinggung kepentingan politik dan ekonomi elite penguasa, Orde Baru berupaya untuk mendeligitimasi gerakan tersebut melalui strategi propaganda dan kontrol wacana publik. Melalui berbagai media massa yang dikontrol negara, pemerintah membentuk narasi bahwa aksi mahasiswa bukan lagi gerakan moral, melainkan ancaman politik yang ditunggangi kepentingan tertentu entah itu kekuatan asing, kelompok kiri, atau mantan simpatisan partai terlarang. Framing seperti ini sengaja diciptakan untuk mencabut legitimasi moral mahasiswa di mata masyarakat. Dengan begitu, tindakan represif seperti pembubaran organisasi mahasiswa, penangkapan aktivis, hingga pembredelan media dapat dibenarkan dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Inilah bentuk nyata dari hegemoni ideologis Orde Baru: mengendalikan bukan hanya tindakan, tetapi juga cara berpikir public (Mardianti, 2022).

Tabel 1. Media-media yang Dibredel Pemerintah Orde Baru

| No. | Nama Media     | Keterangan                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tempo          | Majalah berita mingguan yang dibredel pada 21 Juni 1994 karena pemberitaannya mengenai pembelian kapal perang eks Jerman Timur dianggap mengganggu stabilitas nasional. |
| 2   | Editor         | Majalah berita yang SIUPP-nya dicabut pada 21 Juni 1994. Pemerintah menyatakan terdapat pelanggaran administratif dalam pengelolaannya.                                 |
| 3   | DeTIK          | Tabloid mingguan yang dibredel bersama Tempo dan Editor pada 21 Juni 1994 karena dianggap memuat pemberitaan yang mengganggu stabilitas nasional.                       |
| 4   | Sinar Harapan  | Surat kabar yang izin cetaknya pernah dicabut pada 1973 dan mengalami berbagai tekanan akibat pemberitaannya yang kritis terhadap pemerintah.                           |
| 5   | Kompas         | Pada 1978 sempat mengalami larangan terbit sementara bersama beberapa media lain karena pemberitaannya dianggap menghasut.                                              |
| 6   | Indonesia Raya | Surat kabar yang dipimpin Mochtar Lubis dan mengalami tekanan hingga akhirnya ditutup setelah Peristiwa Malari 1974.                                                    |
| 7   | Harian KAMI    | Salah satu media yang dicabut izin terbit dan cetaknya setelah Peristiwa Malari 1974.                                                                                   |
| 8   | Abadi          | Surat kabar yang dibredel pasca-Peristiwa Malari 1974.                                                                                                                  |
| 9   | Nusantara      | Media yang izin terbitnya dicabut pemerintah setelah Peristiwa Malari 1974.                                                                                             |
| 10  | Pedoman        | Surat kabar yang dibredel setelah Peristiwa Malari 1974.                                                                                                                |
| 11  | Ekspres        | Majalah berita mingguan yang dicabut izin terbitnya setelah Peristiwa Malari 1974.                                                                                      |

|    |                     |                                                                                  |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | The Jakarta Times   | Surat kabar yang terkena pembredelan pasca-Peristiwa Malari 1974.                |
| 13 | Pemuda Indonesia    | Media yang izin terbitnya dicabut oleh pemerintah setelah Peristiwa Malari 1974. |
| 14 | Mahasiswa Indonesia | Surat kabar mahasiswa yang dibredel setelah Peristiwa Malari 1974.               |

Sumber: Tempo, 2025; Hermawan et al. (2022)., 2022; Yasin, 2025; Aliansi Jurnalis Independen, 2025

Propaganda ini secara perlahan menggeser posisi mahasiswa dari subjek moral menjadi objek politik. Pemerintah menstigma gerakan mahasiswa sebagai bagian dari kekacauan sosial, bukan lagi suara keadilan. Padahal, seperti yang tampak dalam konteks Peristiwa Malari 1974, kritik mahasiswa terhadap ketimpangan ekonomi dan dominasi modal asing sejatinya merupakan bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan bangsa. Namun, melalui rekayasa narasi, Orde Baru berhasil membalik persepsi publik: bahwa oposisi terhadap kebijakan negara identik dengan tindakan subversif. Dari sinilah tampak bahwa propaganda Orde Baru tidak sekadar represif, tetapi juga manipulatif. Ia mengendalikan opini, mengonstruksi stigma, dan menghapus ruang dialog kritis antara negara dan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang mempelajari dinamika politik era tersebut, saya melihat bagaimana rezim Soeharto dengan cerdik menggunakan *soft power* ideologis untuk mempertahankan kekuasaannya. Gerakan moral yang sejatinya lahir dari kegelisahan terhadap ketimpangan akhirnya dipaksa bergeser menjadi simbol ancaman sebuah ironi di mana idealisme muda dibungkam atas nama stabilitas.

## Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru merupakan refleksi dari kesadaran moral yang lahir dari kekecewaan terhadap arah pembangunan nasional yang tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa tampil sebagai *moral force* yang berupaya menjaga idealisme keadilan sosial di tengah praktik korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan negara terhadap modal asing. Namun, idealisme ini kemudian berhadapan dengan rezim yang otoriter dan pragmatis, yang melihat kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan. Melalui propaganda, Orde Baru berhasil mengubah citra gerakan mahasiswa dari kekuatan moral menjadi stigma politik, dengan menuduh mereka sebagai pihak yang ditunggangi kepentingan asing atau kelompok oposisi.

Transformasi makna ini menunjukkan bagaimana kekuasaan mampu membentuk persepsi publik dan mengontrol narasi politik demi mempertahankan dominasinya. Peristiwa seperti Malari 1974 menjadi titik balik yang menandai berakhirnya ruang kebebasan politik mahasiswa, sekaligus mempertegas karakter represif Orde Baru dalam mengelola kritik sosial. Di balik represi tersebut, gerakan mahasiswa tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah politik Indonesia bahwa di tengah kuatnya kekuasaan, selalu ada kekuatan moral yang berani bersuara demi kebenaran dan keadilan sosial. Dengan demikian, gerakan mahasiswa bukan sekadar fenomena politik, melainkan simbol perjuangan nurani yang terus menantang kekuasaan yang menindas di hampir setiap era.

## Referensi

- Agustina, W. (2014). *Massa misterius Malari: rusuh politik pertama dalam sejarah Orde Baru*. Tempo Publishing.
- Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Menolak Lupa, Menolak Soeharto Jadi Pahlawan: Warisan Represi Pers dan Ancaman Kebebasan Berekspresi*. <https://aji.or.id/informasi/menolak-lupa-menolak-soeharto-jadi-pahlawan-warisan-represi-pers-dan-ancaman-kebebasan>. Diakses 10 Juli 2026.
- Bank Indonesia. (2017). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2017*. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2017.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2017.aspx). Diakses 10 Juli 2026.
- Farchan, Y. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152-161. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41>.
- Fathonah, A. D., Sutiyah, S., & Yuniyanto, T. (2023). Peristiwa Malari dan Dampaknya terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia (1974-1998). *Candi: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 24(1), 1-11. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/91141>.
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Media Verleden*, 1(1), 1-109.
- Hermawan, A., Yuniarti, F., Tanuredjo, B., & M, M. R., (2022). *Pemerintah Batalan SIUPP Tempo, Editor, dan Detik*. <https://www.kompas.id/artikel/pemerintah-batalan-siupp-tempo-editor-dan-detik>. Diakses 10 Juli 2026.
- Hill, H. (1996). *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Tiara Wacana.
- Huda, S. (2023). *Gerakan Intelektual-Politik Arief Budiman Masa Awal Orde Baru (1967-1972)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Huntington, S. P. (1991). The third wave. *Journal of Democracy*, 2(2), 12-34. <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0016>.
- Khairani, R. M. (2016). *Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) Gerakan Mahasiswa Menentang Modal Jepang*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Kuntowijoyo. (2015). *Penjelasan Sejarah (Historical Explanation)*. Tiara Wacana.
- Jazimah, I. (2013). MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 3(1), 9-34. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v3i01.902>.
- Lailah, A., & Syah, I. (2013). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 1(2), 1-11. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/245/0>.
- Legowo, S. H., Krisnadi, I. G., & Sumartono, H. (2013). Dinamika Politik Rezim Orde Baru di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun 1990-1996. *Publika Budaya*, 1(1), 16-24.

- Listari, I. F. (2012). *Peran asisten pribadi Soeharto dalam perpolitikan Indonesia 1969-1974* Skripsi. Universitas Negeri Malang.
- Mardianti, E. (2022). Gerakan mahasiswa dalam pusaran tiga orde kekuasaan: Antara gerakan moralis atau gerakan politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 82-103. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.82-103>.
- Mintapraja, R. K. (2021). *Aktivitas politik Arief Budiman (Soe Hok Djinn) pada masa Orde Baru (1966-1997)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Nurlaeni, I. (2022). *Malari 1974: Aksi protes atas kebijakan industrial Orde Baru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Padiatra, A. M. (2015). MALARI: Dari Situasi, Aksi, hingga Rusuh pada Awal Orde Baru, 1970–1974. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(8), 103-119.
- Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*, 9(2), 36-42. <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>.
- Rajab, B. (2004). Negara orde baru: berdiri di Atas sistem ekonomi dan politik yang rapuh. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(3), 182-202. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5528>.
- Rosyidah, A. (2025). *Dinamika Kepemimpinan Jenderal Soemitro Sastrodihardjo sebagai Pangkoptamtib Dinamika kepemimpinan Jenderal Soemitro Sastrodihardjo sebagai Pangkoptamtib (1971-1974) dalam peristiwa malari 1974 (1971-1974) dalam Peristiwa Malari 1974*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Satriya, F. Y. (2016). *Konstruksi realitas peristiwa malapetaka 15 Januari (Malari) di majalah tempo (Studi Analisis Wacana terhadap Laporan Utama 40 Tahun Peristiwa Malari "Massa Misterius Malari"*. Majalah Tempo Periode 4226/13-19 Januari 2014.
- Situmeang, B. H. (2012). *Peristiwa Malari dan Aktor-Aktor Intelektual Terlibat di Dalamnya*. Skripsi. Universitas Negeri Medan.
- Suharsih & Kusuma, I. M. (2007). *Bergerak bersama rakyat: sejarah gerakan mahasiswa dan perubahan sosial di Indonesia*. Resist Book.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru: Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta. *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 73-98. <https://www.journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/986>.
- Tempo. (2025). *Kilas Balik 31 Tahun Pembredelan Tempo, Editor, dan Detik oleh Orde Baru*. <https://www.tempo.co/politik/kilas-balik-31-tahun-pembredelan-tempo-editor-dan-detik-oleh-orde-baru-1766610>. Diakses 10 Juli 2026.
- Yasin, A. (2025). *Pembredelan Tiga Media 21 Juni 1994: Tempo, DeTIK, dan Editor Dilarang*.

Ganda Febri Kurniawan, Alfira Apriyanti/Peristiwa Malari 1974: Pergeseran Narasi dari Gerakan Moral ke Stigma Politik dalam Propaganda Orde Baru

<https://www.kompas.com/stori/read/2025/06/21/070000379/pembredelan-tiga-media-21-juni-1994--tempo-detik-dan-editor-dilarang>. Diakses 10 Juli 2025.